

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi serta dari hasil temuan dilapangan terhadap Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Tlogomas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan P2KP di Kelurahan Tlogomas menggunakan kombinasi pendekatan *top down* dan *bottom up* agar dapat mengenai sasaran dan berhasil mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang masih tergolong miskin. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai suatu program pembangunan yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin berusaha merepakan kedua pendekatan di atas untuk menumbuhkan semangat dan motivasi untuk memberdayakan diri di bidang ekonomi, dan mengembangkan institusi lokal sebagai soko guru proses pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksana P2KP di Kelurahan Tlogomas dilakukan oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), Fasilitator Kelurahan dan Kader Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Disini Konsultan Manjemen Wilayah (KMW) melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan P2KP, serta berkoordinasi dengan pemerintah Propinsi dan Kota atau Kabupaten untuk menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, serta mencari jalan keluar sebaik-baiknya apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan Program P2PK, baik di masyarakat maupun BKM.
3. Proses pelaksanaan P2KP di Kelurahan Tlogomas dimulai dengan tahap persiapan dan Sosialisai awal oleh Tim persiapan P2KP, tahap Rembug Kesiapan Masyarakat, tahap Menyimpulkan dan merefleksikan Kemiskinan, tahap Pemetaan Swadaya, tahap Membangun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (KSM), tahap Perencanaan Partisipatif warga untuk

mengembangkan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis), tahap Sinergi PJM Pronangkis dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, tahap Pelaksanaan dan Pemantauan Program P2KP, dan yang terakhir tahap Evaluasi Program.

4. Peran masyarakat dalam Program P2KP sangat berarti dalam keberhasilan program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program P2KP ini tidak akan berhasil baik tanpa melibatkan masyarakat tersebut sebagai aktor atau subyek dalam program yang dijalankan, karena masyarakatlah yang mengerti apa yang paling dibutuhkan dan bagaimana menyelesaikan kendala yang dihadapi.
5. Proses pemberdayaan dalam kerangka P2KP dilakukan secara bertahap melalui proses social learning, dimana peran pemerintah (melalui KMW dan Fasilitator Kelurahan serta PJOK) sebagai pendamping masyarakat semakin lama semakin berkurang, sehingga masyarakat secara perlahan menjadi lebih mandiri dan berdaya. Proses pemberdayaan ini dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan dan dengan memperkuat, mengembangkan dan memberdayakan institusi lokal. Kedua lembaga ini diharapkan dapat membentuk jaring-jaring keberdayaan di kalangan miskin perkotaan.
6. Pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Tlogomas terdapat beberapa faktor pendorong, yaitu Pelaksana Program yang profesional yang memiliki integritas tinggi dalam usaha memberdayakan masyarakat Kelurahan Tlogomas, serta respon masyarakat yang cukup antusias untuk ikut dalam Program P2KP.
7. Dalam pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Tlogomas berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat jalannya proses pelaksanaan program P2KP, faktor penghambatnya adalah masih terdapat kredit macet dalam usaha ekonomi produktif.

B. Saran

Dari hasil analisis dan interpretasi data yang sudah disajikan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk

pelaksanaan P2KP berikutnya. Setelah melihat dan mencermati dampak pelaksanaan P2KP di Kelurahan Tlogomas, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan program tersebut adalah:

1. Perlunya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan benar-benar konsisten menegakkan misi, visi, tujuan, prinsip-prinsip dan nilai P2KP dalam pelaksanaan P2KP dikemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata berorientasi formalitas, melainkan harus difokuskan pada "pendekatan proses", dengan melibatkan dan membuka kesempatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan (masyarakat termiskin, jompo, dll), untuk dapat terlibat aktif mengambil keputusan mengenai penawaran P2KP ini.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mempertimbangkan pemilihan alternatif-alternatif pemecahan yang dianggap paling dapat menjawab permasalahan dan dapat dilakukan oleh masyarakat, sesuai sumber daya dan sumber daya manusia yang ada.
3. Meningkatkan orientasi masyarakat untuk senantiasa bertumpu pada akar permasalahan serta kebutuhan riil dan potensi mereka, untuk kemudian dicarikan jalan pemecahannya secara bersama-sama.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan pemahaman akan pentingnya program P2KP, agar masyarakat bisa mengawal jalannya pelaksanaan P2KP dengan berperan aktif mengawasi, memberikan masukan-masukan serta mengkritisi tindakan aktor-aktor yang terlibat dalam Pelaksanaan P2KP supaya tetap bekerja sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada.
5. Meskipun program ini di desain semudah mungkin untuk di akses oleh masyarakat sasaran, namun beberapa hal terdapat prosedur yang perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dan dapat menarik minat masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program.
6. Pengalaman yang dialami beberapa KSM yang gagal dalam usahanya menunjukkan pentingnya pelatihan bagi KSM, terutama mengenai

masalah teknis manajemen pengelolaan usaha atau industri kecil serta pengelolaan keuangan. Keberdayaan yang telah dicapai oleh BKM hendaknya disalurkan pula kepada KSM dan masyarakat Kelurahan lainnya.

7. Terjadinya kemacetan dalam angsuran dana bantuan merupakan preseden kurang baik dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, BKM maupun masyarakat perlu mengembangkan sistem peraturan dan sanksi yang lebih efektif bagi terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana program ini, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dengan demikian masyarakat akan berperan aktif sebagai pengawas yang turut bertanggung-jawab atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan program.

